

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Saat ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan upaya yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kedamaian abadi dan kesejahteraan sosial

Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional harus dilaksanakan di segala bidang. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor keamanan. Guna mencapai semuanya itu diperlukan peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan (*public welfare*) pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang memiliki berbagai masalah pembangunan di dalamnya. Pada dekade tahun tujuh puluhan,

Schumacer dalam bukunya "*Small Is Beautiful*" telah mengingatkan bahwa persoalan negara berkembang terletak pada dua juta desa yang miskin dan terbelakang. Menurut Schumacher "Selama beban hidup di pedesaan tidak dapat diringankan, maka masalah kemiskinan di dunia tidak akan dapat diselesaikan, dan mau tidak mau pasti akan lebih memburuk". Wasistiono dan Tahir, (2006: 42)

Oleh karena itu, akar pemberdayaan masyarakat miskin seharusnya memang dimulai dari desa, dimana permasalahan tersebut pertama kali muncul dikarenakan kurang terbukanya pemikiran masyarakat pedesaan mengenai pentingnya pemberdayaan di segala bidang untuk mengurangi dampak kemiskinan. Namun, berkaca dari pemikiran tersebut, meskipun saat ini Negara Indonesia masih merupakan negara berkembang, namun persoalan yang seringkali muncul mengenai fenomena kemiskinan bukanlah hanya berasal dari pedesaan, bahkan cenderung mayoritas adalah dari perkotaan, hal ini mungkin juga disebabkan dari urbanisasi besar-besaran oleh masyarakat pedesaan menuju ke perkotaan. Hal tersebut membuktikan bahwa persoalan pemberdayaan masyarakat miskin harus dilakukan dari berbagai arah secara bersama-sama, bukan hanya dari pedesaan saja tetapi juga dari perkotaan.

Kemiskinan bukanlah suatu sosok yang *amorphous* (sesuatu yang bersifat abstrak) tetapi merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan multimedimensional. Rendahnya tingkat taraf hidup yang sering kali dijadikan alat pengukur kemiskinan, pada hakekatnya hanyalah sejumlah faktor yang mewujudkan sindrom kemiskinan. Dari segi politik-ekonomi, kemiskinan dipahami sebagai produksi dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang keseluruhannya menciptakan kondisi miskin. Dari segi ini kemiskinan juga dianggap sebagai konsekuensi dari proses

yang telah mendorong konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di suatu pihak dan menumbuhkan masa pinggiran yang mempunyai posisi penawar yang lemah di lain pihak. Moeljarto Tjokrowinoto (1996:4)

Sehubungan dengan itu, pemerintah memandang perlu untuk membentuk suatu lembaga pemberdayaan yang mampu mengevaluasi program-program sebelumnya, terutama dalam menanggulangi persoalan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Kegiatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang kini kita alami, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa intitusi masyarakat yang menguat bagi perkembangannya dimasa mendatang. Pada akhirnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. (Kumaidi, PNPM Mandiri ([http://fenditungkal.blogspot.com/2010/11/Upaya Keluar Dari Kemiskinan](http://fenditungkal.blogspot.com/2010/11/Upaya%20Keluar%20Dari%20Kemiskinan), di akses 15 November 2012)

Harapan evaluasi terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang sering kali mengalami kegagalan serta peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan muncul kembali seiring peluncuran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat P2KPDT. Ditengah upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional, masih saja terdapat daerah yang tergolong ke dalam daerah tertinggal. Berdasarkan keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No : 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Pembangunan Daerah Tetinggal, dinyatakan bahwa terdapat 199 daerah di Indonesia yang tergolong tertinggal.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional semestinya tidak ada kesenjangan pembangunan di masing-masing daerah di Indonesia, karena

pembangunan dimaknai sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa dalam rangka pembinaan bangsa. Siagian (2000: 4)

Pembangunan untuk daerah tertinggal perlu mendapatkan perhatian yang lebih demi terciptanya pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Berdasarkan keputusan menteri pembangunan daerah tertinggal nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal, dinyatakan bahwa :

“Pada hakekatnya pembangunan nasional harus bersifat adil, demokrasi, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi sehingga kesenjangan pembangunan daerah yang ada saat ini dapat diatasi, dengan demikian untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah maka diperlukan strategi nasional pembangunan daerah tertinggal sebagai landasan bagi semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien”.

Tabel 1. Sebaran Rata-rata Bantuan P2KPDT Tahun 2007 – 2009

No.	Propinsi	Jumlah Kab. Tertinggal	Rata-Rata Bantuan P2KPDT			Pertumbuhan
			2007	2008	2009	
1.	Nangroe Aceh Darussalam (NAD)	16	41,36	132,82	627,55	1.417,29
2.	Sumatera Utara	6	1.375,78	1.277,65	1.427,96	4,30
3.	Sumatera Barat	2	683,64	2.047,58	1.427,64	108,83
4.	Riau	2	1.717,57	4.827,82	5,261,66	206,34
5.	Jambi	2	957,60	2.233,21	2.213,04	131,10
6.	Sumatera Selatan	6	949,95	1.319,62	1.362,48	43,43
7.	Bengkulu	8	786,44	2.189,47	1.331,44	69,30
8.	<b>Lampung</b>	<b>5</b>	<b>1.303,11</b>	<b>1.486,77</b>	<b>2.205,25</b>	<b>55,42</b>
9.	Bangka Belitung	3	437,38	1.167,89	2.083,92	376,46

10.	Kepulauan Riau	1	996,00	2.965,94	615,99	(38,15)
11.	Jawa Barat	2	723,70	1.422,01	773,15	6,83
12.	Jawa Tengah	3	1.387,83	2.063,75	1.870,47	34,83
13.	D.I. Yogyakarta	2	345,12	1.530,30	1.478,41	328,38
14.	Jawa Timur	8	1.059,34	1.699,66	1.346,24	27,08
15.	Banten	2	400,15	2.032,29	1.434,95	258,60
16.	Bali	1	0	699,47	546,52	(21,87)
17.	Nusa Tenggara Barat	7	1.809,65	1.533,21	1.309,53	(27,64)
18.	Nusa Tenggara Timur	15	1.276,22	1.621,85	1.413,65	10,77
19.	Kalimantan Barat	9	974,00	1.078,28	1.133,49	16,37
20.	Kalimantan Tengah	7	816,15	1.309,08	1.160,28	42,17
21.	Kalimantan Selatan	2	1.167,22	1.566,87	1.360,87	7,39
22.	Kalimantan Timur	3	316,25	1.585,16	1.502,71	37,17
23.	Sulawesi Utara	2	1.181,27	3.371,18	2.507,89	112,27
24.	Sulawesi Tengah	9	1.055,81	1.385,98	1.403,51	33,03
25.	Sulawesi Selatan	13	515,40	1.060,98	1.572,99	71,84
26.	Sulawesi Tenggara	8	718,91	857,99	2.149,33	198,97
27.	Gorontalo	4	983,83	1.747,71	1.799,37	82,91
28.	Sulawesi Barat	5	982,98	1.393,61	1.980,64	101,49
29.	Maluku	7	807,49	1.138,58	1.837,39	127,54
30.	Maluku Utara	6	1.178,32	1.228,78	1.498,22	27,15
31.	Papua Barat	7	1.009,70	988,85	981,37	(2,81)
32.	Papua	19	1.092,02	1.086,57	973,51	(10,85)
<b>INDONESIA</b>		<b>199</b>	<b>990,98</b>	<b>1.443,95</b>	<b>1.444,19</b>	<b>45,73</b>

Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan kedalam daerah tertinggal, berdasarkan keputusan menteri pembangunan daerah tertinggal nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 sehingga Kabupaten Lampung Barat mendapatkan program dari kementerian pembangunan daerah tertinggal agar mampu sejajar atau bahkan melebihi daerah-daerah sekitarnya. Pada tahun 2009 Kabupaten Lampung Barat melaksanakan program P2KPDT yang lebih diarahkan untuk memilih komoditas yang cepat menghasilkan seperti ternak, dalam pelaksanaan program P2KPDT ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat mendapatkan bantuan hewan ternak dari kementerian pembangunan daerah tertinggal yakni bantuan 108 ekor sapi untuk lima kelompok tani di lima kecamatan yaitu Kecamatan Sekincau, Kecamatan Kebun Tebu, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Pesisir Selatan, dan Kecamatan Gedung Surian.

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan P2KPDT di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009

No.	Tahun	Nama Kegiatan	Wilayah Penerima Bantuan
1.	2009	Pengembangan karet unggul dengan luas 180 HA dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Desa Negeri Ratu . Tenumbang 2. Desa Pelita Jaya 3. Desa Sukarame
2.	2009	Bantuan hewan ternak dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Kecamatan Sekincau 2. Kecamatan Kebun Tebu 3. Kecamatan Way Tenong 4. Kecamatan Pesisir Selatan 5. Kecamatan Gedung Surian

Sumber : Data Diolah, Tahun 2012

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, program P2KPDT ini masih menuai kritik terutama kritik yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Poros Pemuda yang mengeritik mengenai keberadaan ternak-ternak hasil bantuan

tersebut, setelah di lapangan dirasa tidak jelas keberadaannya dan jumlah antara bantuan yang diserahkan pemerintah daerah tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.(sumber:[http://translampungku.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=568:awasi-bantuan-ternak&catid=16:lampung-barat&Itemid=15](http://translampungku.com/index.php?option=com_content&view=article&id=568:awasi-bantuan-ternak&catid=16:lampung-barat&Itemid=15)) diakses pada tanggal 13 April 2012.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang sejauhmana dampak program P2KPDT di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2009 berjalan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki pelaksanaan P2KPDT ini pada tahun yang akan datang.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang kan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pencapaian program P2KPDT di kabupaten Lampung Barat pada tahun 2009?
2. Apa sajakah dampak program P2KPDT terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pencapaian program P2KPDT di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2009.
2. Untuk mengetahui apa sajakah dampak program P2KPDT terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

1. **Secara teoritis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya studi tentang Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT)
2. **Secara Praktis**, penelitian ini diharapkan dapat :
  - a. Memberikan informasi dan partisipasi aktif masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Barat dalam setiap program P2KP-DT dan banyaknya manfaat yang akan di dapat setelah mereka turut serta dalam mensukseskan program P2KP-DT tahun 2009
  - b. Memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Barat agar dapat lebih memaksimalkan motivasi untuk berpartisipasi dalam setiap Program P2KP-DT tahun 2009
  - c. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tentang bagaimana upaya meningkatkan motivasi masyarakat dalam program P2KP-DT tahun 2009